

**PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM DIPLOMASI MODERN
DEPARTEMEN LUAR NEGERI RI**

Syafril Alam
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Satya Negara Indonesia
Jl. Arteri Pondok Indah No. 11, Jakarta Selatan
safril_sir@yahoo.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah membawa banyak perubahan dalam dunia internasional. Di era globalisasi saat ini, akses informasi tanpa batas telah membuat perubahan-perubahan signifikan dalam berbagai hal. Dunia hubungan internasional tentu tidak lepas dari dampak kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan internet membantu pembicaraan antarkepala negara atau perwakilan negara sekalipun pihak-pihak yang bersangkutan tidak berada pada tempat yang sama. Artinya, internet sangat membantu efisiensi diplomasi, baik dalam segi waktu maupun biaya. Oleh karena itu, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia berupaya membangun suatu sarana komunikasi resmi yang dapat menjamin seluruh keakuratan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan diplomasi dan politik luar negeri RI, yakni dengan mewujudkan portal resmi www.deplu.go.id sebagai upaya pelaksanaan diplomasi virtual.

Kata kunci: diplomasi, diplomasi modern, diplomasi virtual, teknologi informasi dan komunikasi, Indonesia, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Abstract

The development of information and communication technology today has brought many changes in the international world. In the current era of globalization, the unlimited access to information has made a significant change in many ways. The international relations world surely cannot be separated from the impact of this progressive development of information and communications technology. The use of the internet has made the talks between heads of state or representatives of the countries more possible even if the parties concerned are not in the same place. That means the internet has made diplomacy more efficient in terms of time and cost. Therefore, the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia seeks to establish a formal means of communication which can ensure the accuracy of all Indonesia's diplomatic activities and foreign policy-related data and informations, namely by creating the official portal www.deplu.go.id to implement the effort of virtual diplomacy.

Keywords: diplomacy, modern diplomacy, virtual diplomacy, information and communication technology, Indonesia, Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah membawa banyak perubahan dalam dunia internasional. Di era globalisasi saat ini, akses informasi tanpa batas telah membuat perubahan-perubahan signifikan dalam berbagai hal. Dunia hubungan internasional tentu tidak lepas dari dampak kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Kenichi Ohmae menyebutkan informasi sebagai penggerak globalisasi dan mendorong keterlibatan publik secara global dalam hubungan internasional (Ohmae, 2002: 32). Dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat kita rasakan salah satunya dalam perubahan praktek diplomasi dari zaman diplomasi lama menuju diplomasi baru (modern).

Dewasa ini, aktivitas diplomasi praktis sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Munculnya berbagai teknologi komunikasi seperti radio, televisi, satelit, dan internet memudahkan manusia untuk saling berkomunikasi. Diplomasi, sebagai alat komunikasi antarnegara, kemudian dalam perkembangannya juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Diplomasi, di zaman teknologi informasi saat ini, menjadi

lebih terbuka dengan adanya kemajuan teknologi. Keterbukaan informasi merupakan faktor yang penting dalam perubahan praktek diplomasi di era modern.

Setelah *booming CNN effect* membuat media televisi mempengaruhi aktivitas diplomasi berbagai negara, internet muncul sebagai sebuah terobosan penting dalam berdiplomasi. Melalui internet, publik memiliki kebebasan dalam mengakses dan menganalisis setiap keputusan yang diambil oleh negara. Perkembangan teknologi informasi ini telah meningkatkan tuntutan keterlibatan masyarakat untuk ikut berperan dalam hubungan global. Aktivitas diplomasi akhirnya tidak lagi menjadi milik istimewa aktor resmi pemerintah. Tak heran kemudian muncul istilah “diplomasi tanpa diplomat” (*diplomacy without diplomat*) yang berarti kegiatan diplomasi dapat dilakukan tanpa peran diplomat.

Kekhawatiran akan berkurangnya peran diplomat akibat kemajuan teknologi informasi tersebut telah diungkapkan oleh Harold Nicholson. Nicholson mengatakan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat menyebabkan peran dan fungsi seorang duta besar semakin berkurang. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat memerosotkan status duta besar sebagai

tenaga administrasi saja (Olson dan Sonderman, 1974: 225). Menanggapi perkembangan ini, kemudian muncul konsep-konsep seperti *virtual diplomacy*, *cyber diplomacy*, atau *e-diplomacy*. Kemajuan teknologi informasi akhirnya melahirkan diplomasi virtual (*virtual diplomacy*) yang terbukti dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri sebuah negara. Dalam perkembangan selanjutnya, dunia virtual bahkan dimanfaatkan secara matang oleh negara dalam rangka memperlancar aktivitas diplomasi yang tengah dilakukannya. Oleh karena itu, saat ini mulai muncul tuntutan untuk mempublikasikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri secara luas kepada publik.

Salah satu bentuk diplomasi virtual yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (Deplu RI) adalah diluncurkannya portal (*website*) resmi www.deplu.go.id. Upaya untuk membuat langkah *cyber diplomacy* tersebut sudah mulai dijalankan sejak sembilan tahun yang lalu, dan baru resmi diluncurkan pada bulan Oktober 2009. Melihat kecenderungan adanya perubahan dari praktek diplomasi konvensional ke bentuk diplomasi yang lebih modern dengan menggunakan dunia virtual, *cyber*, maupun elektronik ini, maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih

lanjut mengenai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam perkembangan diplomasi modern dengan studi kasus pembuatan situs resmi Deplu RI.

Harus diakui, bahwa kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat perubahan-perubahan yang sangat signifikan dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Para aktor negara dan non-negara yang ingin mengadakan transaksi apapun dengan negara lain, dengan sangat mudah, dapat menggunakan teknologi *virtual diplomacy*, *cyber diplomacy*, atau *e-diplomacy*. Untuk itu, permasalahan yang akan penulis teliti adalah “*Bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam diplomasi modern dengan menggunakan studi kasus pembuatan portal resmi www.deplu.go.id?*”

Diplomasi di Era Modern

Menurut *Oxford Dictionary*, diplomasi adalah pengelola dalam masalah-masalah Hubungan Internasional yang dilakukan melalui negosiasi dan dilaksanakan oleh para duta besar, utusan (*papa nuncios/delegation*) khususnya melalui cara-cara perundingan (*bargaining*).

Menurut *Chamber's Dictionary*, diplomasi adalah seni bernegosiasi yang

meliputi perjanjian-perjanjian antarnegara, khususnya berkaitan dengan keterampilan-keterampilan publik.

Sedangkan menurut Sir Ernest Satow, diplomasi adalah pengaplikasian kemahiran dan kebijaksanaan untuk mengatur hubungan luar negeri antara dua negara yang independen. Sementara, Harold Nicholson berpendapat bahwa diplomasi menyangkut lembaga-lembaga, departemen-departemen, atau orang-orang yang mengurus kebijaksanaan politik luar negeri, negosiasi, dan mekanisme jalan keluar dalam perselisihan ataupun konflik serta badan-badan yang melayani urusan-urusan atau masalah-masalah luar negeri.

Dengan demikian, pengertian diplomasi secara menyeluruh adalah proses negosiasi yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh para diplomat yang ditempatkan di negara-negara lain. Secara praktis, pengertian diplomasi ini telah mengalami perluasan makna sebab setelah diplomasi memasuki era modern, diplomasi tidak lagi merupakan hal yang hanya dilakukan oleh diplomat atau pemerintah, tetapi juga bisa dilakukan oleh aktor non-negara, yakni masyarakat umum yang menunjang tercapainya suatu kepentingan nasional.

Diplomasi modern adalah profesi dan metode pengelolaan hubungan antarnegara yang sudah berkembang sejak abad ke-17 dan 18. Salah satu ciri diplomasi modern adalah adanya dukungan yang melembaga (*organized instrument diplomacy*) bagi pelaksanaan tugas diplomasi. Instrumen ini terdiri atas Departemen Luar Negeri di pusat pemerintahan sebagai otak pelaksanaan kebijakan luar negeri (diplomasi) dan perwakilan diplomatik di ibukota negara-negara lain yang merupakan mata, telinga, mulut, dan ujung jari dinas diplomasi (Louis, 2006).

Selama beberapa dekade belakangan ini telah terjadi berbagai perkembangan mendasar dalam hubungan antarnegara yang juga membawa dampak terhadap etika diplomasi dan negosiasi. *Pertama*, proses globalisasi yang secara universal melipatgandakan keterkaitan (*linkages*) dan hubungan-hubungan (*interconnections*) melampaui batas-batas negara serta melibatkan peningkatan interdependensi di bidang ekonomi, ekologi, dan kemasyarakatan secara dramatis, baik dalam jumlah, luas, maupun dalam cakupannya.

Kedua, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan hubungan langsung antara kepala negara dan antara pejabat-pejabat tinggi lain dari ibukota masing-

masing negara. Juga pengiriman delegasi untuk negosiasi langsung dari negara yang bersangkutan guna merundingkan isu-isu yang spesifik.

Ketiga, makin banyaknya negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi pada gilirannya akan mendorong timbulnya perkembangan-perkembangan lanjutan, seperti: a) keterbukaan di mana masyarakat ingin mengetahui kiprah diplomasi dan apa yang dilakukan oleh para pelaksana diplomasi; b) munculnya aktor-aktor non-negara; c) lahirnya *first-track* dan *second-track diplomacy* yang kemudian berkembang lagi menjadi *multi-track diplomacy*; d) tidak populernya lagi negosiasi-negosiasi diplomatik rahasia (*secret diplomatic negotiations*); dan e) merebaknya multilateral dan *conference diplomacy* yang memakai *parliamentary procedures* (Louis, 2006).

Adapun pengertian *virtual diplomacy*, menurut E.J. Dionne, Jr., meliputi pengambilan keputusan, koordinasi, komunikasi, dan praktek hubungan internasional yang dipengaruhi oleh bantuan teknologi informasi dan komunikasi (Dionne, 2008). Istilah ini dapat kita samakan pengertiannya dengan istilah *cyber diplomacy* atau *electronic diplomacy (e-diplomacy)*. *E-diplomacy* sendiri, menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, didefinisikan sebagai

sebuah sarana khusus dalam berdiplomasi yang menitikberatkan pada usaha untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang berkaitan dengan diplomasi Amerika Serikat melalui internet. *E-diplomacy* ini juga dibangun untuk merespon informasi-informasi dari luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan Amerika Serikat yang dilakukan di dunia maya (<http://www.state.gov/irm/ediplomacy/>).

Sedangkan *cyber diplomacy* dapat diartikan sebagai perluasan penggunaan internet sebagai salah satu sumber teknologi informasi yang dapat mengefektifkan pelaksanaan suatu kebijakan luar negeri (<http://english.people.com.cn/9001/6698096.html>).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian umum dari *virtual diplomacy*, *cyber diplomacy*, dan *e-diplomacy* adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan internet yang merupakan salah satu media teknologi informasi sebagai sarana pengefektifan sebuah praktek diplomasi untuk menjalin hubungan luar negeri dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan luar negeri.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan jurnal ini adalah metode deskriptif dan historis. Metode deskriptif memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. (Nazir, 1988: 63-64). Metode ini digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis sejauh apakah pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam perkembangan diplomasi di era modern dengan menggunakan studi kasus portal resmi www.deplu.go.id. Sementara metode historis adalah deskripsi yang terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan pendekatan dan studi yang kritis untuk mencari kebenaran (Surakhmad, 1998: 141).

Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi dalam Diplomasi Modern

Perkembangan dunia yang semakin tanpa batas membuat jaringan antarmanusia di dunia semakin rapat. Dalam kaitannya dengan diplomasi, saat ini teknologi internet pada dasarnya sangat penting untuk menunjang nilai jual atau nilai tawar yang dimiliki oleh suatu negara agar dapat memasarkan dirinya secara efektif melalui media internet.

Internet juga memungkinkan publik turut berpartisipasi dalam memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan luar negeri. Opini publik dapat tercermin dalam bentuk berita internet, analisis dari suatu lembaga akademis, maupun opini pribadi dalam blog yang sangat mengusung konsep jurnalisme publik (*citizen journalism*).

Dengan demikian, publik tidak hanya menjadi penonton pasif dari kelangsungan aktivitas diplomasi, namun juga menjadi aktor aktif yang turut menentukan berjalannya praktek hubungan internasional. Itulah sebabnya negara-negara seperti China dan Myanmar berupaya keras melarang pemberitaan atau opini pribadi bernuansa kritik karena dapat merusak citra negara dan memprovokasi masyarakat lainnya untuk melawan pemerintah.

Dengan bantuan internet, pembicaraan antarkepala negara atau perwakilan negara sekalipun pihak-pihak yang bersangkutan tidak berada pada tempat yang sama. Artinya, internet sangat membantu efisiensi diplomasi, baik dalam segi waktu maupun biaya. Dari segi waktu karena kepala negara atau perwakilan negara dapat kembali melakukan aktivitasnya segera setelah melakukan aktivitas diplomasi. Komunikasi lebih lanjut juga menjadi lebih mudah dilakukan tanpa perlu

menunda aktivitas lainnya. Dari segi biaya karena upacara protokoler, yang wajib dilakukan untuk menyambut perwakilan negara, tidak lagi diperlukan. Inilah yang menjadi alasan mengapa Harold Nicholson mengungkapkan kekhawatirannya jika suatu saat nanti diplomat bisa saja berkurang perannya dari yang tadinya berperan sebagai korps elit yang merupakan representasi suatu negara di negara lain menjadi hanya pelaksana tugas administrasi.

Perubahan yang luar biasa dalam teknologi informasi dan komunikasi, yang seringkali disebut sebagai revolusi industri ketiga, memungkinkan aktor-aktor non-negara untuk memiliki *power* melalui penguasaan informasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Francis Bacon, ketika di abad yang lalu menulis bahwa "*information is power*" (Wirajuda, 2003). Informasi telah menjadi "*resource of power*" sekaligus komoditas yang penting bagi negara untuk memperkuat postur dan posisinya dalam politik internasional (Wirajuda, 2003).

Sebagaimana yang telah kita ketahui, proses globalisasi dan revolusi informasi telah memunculkan aktor-aktor baru dalam hubungan internasional. Di Indonesia sendiri, terutama sejak dimulainya proses reformasi, aktor politik dan hubungan internasional jumlahnya semakin bertambah banyak. Persaingan

dalam penguasaan informasi tidak lagi hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga antara negara dan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Sementara itu, revolusi informasi juga telah menambah jumlah saluran-saluran komunikasi dalam struktur politik internasional yang ada (Wirajuda, 2003).

Informasi yang semakin terbuka luas dan bisa diperoleh dengan sangat cepat dari berbagai pihak membuat kekhawatiran tersendiri bagi para pelaksana kebijakan luar negeri (diplomat). Tak heran apabila kemudian muncul ketakutan akan adanya informasi yang tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya sehingga dapat menurunkan citra para diplomat sebagai pelaksana kebijakan luar negeri dan kegiatan diplomasi. Menyadari hal tersebut, Deplu RI berupaya membangun suatu sarana komunikasi resmi yang dapat menjamin seluruh keakuratan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan diplomasi dan politik luar negeri RI. Upaya inilah yang diwujudkan dalam bentuk pembuatan portal resmi www.deplu.go.id.

Portal Resmi sebagai Upaya Diplomasi Virtual Deplu RI

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, dalam pelaksanaan diplomasi modern, Departemen Luar

Negeri adalah institusi utama yang berperan dalam melakukan kegiatan diplomasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah praktek-praktek diplomasi yang dilakukan oleh Deplu RI. Adanya tuntutan untuk memperluas informasi mengenai diplomasi, pelaksanaan politik luar negeri, dan berbagai negosiasi serta perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada masyarakat luas akhirnya turut mengubah salah satu praktek diplomasi yang dilakukan oleh Deplu RI dari diplomasi gaya konvensional menjadi diplomasi virtual.

Pembuatan portal resmi yang dilakukan oleh Deplu RI merupakan respon terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang bukan hanya dapat membantu, melainkan juga dapat menjatuhkan upaya pelaksanaan diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia. Deplu RI menyadari bahwa “informasi tidak sekedar ada, tetapi dibuat untuk melayani kepentingan pembuatnya”. Pada saat yang bersamaan, besarnya jumlah dan kecepatan informasi menghadirkan tantangan tersendiri dalam hal pengelolaan dan penyerapannya, “*the paradox of plenty*”. Mengutip pernyataan Joseph S. Nye, Jr., “*a plentitude of information leads to a poverty of attention. Attention becomes the scarce*

resource, and those who can distinguish valuable signals from background noise gain power”. Dengan kata lain, “*the paradox of plenty*” juga membuka peluang keuntungan bagi mereka yang mampu memancing dan menggiring perhatian publik sehingga mereka dapat membuat opini publik dengan mengatur agenda opini tersebut. Untuk dapat melakukannya, suatu organisasi harus memiliki *competitive edge* dalam pengolahan informasi dalam arti mampu memilah dan menyajikan informasi dengan lebih baik. (Wirajuda, 2003).

Inilah yang diupayakan untuk dibangun oleh Deplu RI dengan meluncurkan portal www.deplu.go.id sebagai upaya penyedia layanan informasi publik di bidang diplomasi dan kebijakan luar negeri yang teruji kredibilitasnya. Portal www.deplu.go.id, yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 1,9 milyar dan telah diresmikan pada bulan Oktober 2009 lalu, akan mengintegrasikan 119 perwakilan Indonesia yang telah bergabung ke dalam portal, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Los Angeles, KBRI di Pretoria, KBRI di Buenos Aires, KJRI di Perth, KBRI di Yangon, KBRI di Wellington, dan Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Swiss (Simamora, 2009).

Melalui portal ini, Warga Negara Indonesia (WNI) dapat melaporkan keberadaan dirinya secara *online*. Demikian juga jika menghadapi masalah, WNI dapat mengakses portal dan operator akan langsung menghubungi perwakilan Deplu terkait (Simamora, 2009).

Dengan adanya situs resmi ini, Deplu RI berupaya menyediakan informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, melalui portal ini pemerintah dapat menetralkan berbagai rumor negatif yang terlanjur berkembang di masyarakat melalui penjelasan yang bisa diakses oleh masyarakat secara online (Simamora, 2009).

Dalam upayanya membangun kredibilitas informasi, Deplu RI melakukan penyebaran informasi secara transparan dan profesional karena mereka terlibat langsung dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri maupun upaya diplomasi. Transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses pembuatan informasi dikedepankan sebagai upaya membentuk kredibilitas informasi. Apabila ada informasi yang tidak akurat, publik dapat mengkritiknya dengan mudah sebab saluran informasi ini tidak hanya berasal satu arah dari pemerintah, tetapi juga dari aktor-aktor lain, seperti media massa dan *non-governmental organizations* (NGO).

Selain itu, adanya situs resmi Deplu RI sangat memungkinkan terjadinya interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang secara langsung dapat menunjang proses pengambilan kebijakan maupun penyebaran informasi mengenai kebijakan luar negeri.

Faktor kecepatan penyebaran informasi juga merupakan faktor lain yang tidak kalah penting. Faktor kecepatan informasi juga dapat dipenuhi melalui reformasi birokrasi, yang memang selalu menjadi tuntutan publik di negara demokratis. Faktor ini telah disadari oleh Deplu RI sehingga situs resmi www.deplu.go.id senantiasa mengalami perkembangan terkini (*update*) dengan berita-berita yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan luar negeri maupun dunia internasional.

Walaupun demikian, tidak semua informasi ditampilkan dalam situs resmi ini. Ada hal-hal yang berkaitan dengan diplomasi yang pada dasarnya sarat dengan unsur kerahasiaan (*secrecy*) sehingga tidak dilemparkan ke ruang publik. Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi Deplu RI untuk menyeimbangkan substansi dan kecepatan waktu antara keperluan untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik untuk mendapatkan informasi dengan keperluan untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan proses diplomasi itu sendiri. Sebagai

ilustrasi, jika suatu negara mengumumkan konsesi yang diperoleh dari negara lain kepada publik pada waktu yang tidak tepat (sebelum perjanjian ditandatangani), bisa jadi malah akan membuat negara itu membatalkannya karena tidak ingin dianggap sebagai pihak yang kalah (Wirajuda, 2003).

Dalam perkembangannya, portal www.deplu.go.id mampu menjadi salah satu instrumen pelaksana diplomasi virtual dengan menyediakan informasi yang akurat mengenai kebijakan luar negeri Indonesia baik bagi masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional. Berbagai dokumen mengenai perjanjian internasional yang dibuat Indonesia, pidato-pidato presiden dan menteri luar negeri, informasi mengenai keberadaan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri dan pelayanan pendaftaran serta perlindungan WNI di luar negeri, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Deplu RI dalam rangka diplomasi publik seperti penyelenggaraan lomba-lomba, pertukaran pelajar, serta pengiriman duta ke negara-negara lain juga disediakan melalui portal tersebut. Penerimaan calon pegawai negeri sipil Deplu RI pun saat ini dipusatkan pula melalui portal tersebut.

Di atas semua itu, pembuatan portal www.deplu.go.id merupakan suatu respon atas perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi di era globalisasi saat ini. Dengan adanya situs www.deplu.go.id tersebut, Deplu RI berupaya mempraktekkan salah satu teknik diplomasi modern, yakni *cyber diplomacy*. Adanya portal ini memungkinkan publik untuk mendapatkan informasi yang luas mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dan pelaksanaan diplomasinya.

Kesimpulan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh dalam pelaksanaan diplomasi di era modern seperti sekarang ini. Globalisasi, yang telah membawa kita pada era keterbukaan informasi akibat berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, telah membawa diplomasi menjadi lebih terbuka dan bukan lagi menjadi konsumsi kalangan terbatas (negara). Para diplomat (negara) saat ini bukan lagi satu-satunya aktor utama dalam hubungan internasional. Aktor-aktor non-negara kemudian muncul sebagai pemain baru dalam hubungan internasional yang tentu saja dapat menjadi ancaman bagi pelaksanaan diplomasi dan kebijakan luar negeri suatu negara apabila mereka memiliki informasi yang menyesatkan bagi publik.

Di era mudahnya komunikasi saat ini, peran diplomat juga dikhawatirkan

akan menurun, seperti yang diungkapkan oleh Harold Nicholson bahwa kelak suatu saat diplomat hanya melaksanakan fungsi administrasi sebab informasi yang diperoleh kepala negara atau kepala pemerintahan mengenai kondisi di luar negeri dapat mereka terima secara langsung melalui media televisi, koran, internet, bahkan langsung dari kepala negara atau kepala pemerintahan negara lain melalui saluran telepon. Menanggapi kedua hal di atas maka dikembangkanlah suatu metode baru dalam pelaksanaan diplomasi di era modern, yakni diplomasi virtual.

Diplomasi virtual merupakan suatu upaya pengefektifan pelaksanaan diplomasi melalui sarana internet. Deplu RI sebagai institusi utama yang melaksanakan fungsi diplomasi dan pelaksanaan kebijakan luar negeri pun tak luput dari perluasan praktek diplomasi sebagai akibat berkembangnya sarana teknologi informasi dan komunikasi. Dalam upaya membangun praktek diplomasi virtual itu, Deplu RI meluncurkan portal resmi www.deplu.go.id.

Dengan adanya portal resmi tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengetahui segala informasi tentang diplomasi dan kebijakan luar negeri yang telah dilaksanakan oleh pemerintah secara kredibel dan akurat. Pembuatan portal

resmi ini juga dapat dijadikan sebagai suatu sarana untuk menghubungkan pemerintah dan masyarakat dalam rangka menyebarluaskan berbagai program pemerintah yang terkait dengan hubungan internasional serta meningkatkan pelayanannya bagi WNI yang berada di luar negeri. Upaya pembuatan situs resmi Deplu RI ini dapat kita beri apresiasi sebagai usaha pemerintah dalam menyesuaikan peranan diplomasinya sesuai dengan perubahan zaman yang semakin maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nicholson, Harold. *Diplomacy*. Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 1964.
- Ohmae, Kenichi. *Hancurnya Negara Bangsa: Bangkitnya Negara-Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Terbatas*. Yogyakarta: Qalam, 2002.
- Olson, William C. dan Fred A. Sonderman. *The Theory and Practice of International Relation*. Second Edition. New Jersey: Prentice Hall, 1974.

Panikkar, K.M. *The Principle and Practice of Diplomacy*. Bombay: Ranjit Printers & Publisher, 1957.

Satow, Sir Ernest. *Guide to Diplomacy Practice*. Fifth Edition. London: Longman, 1979.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1998.

Dokumen Lain

Dionne, E.J., Jr. "Virtual Diplomacy". *Washington Magazine* (18 Mei 2008).

Louis, Wisber. *Ikhtisar Kuliah pada Jurusan HI FISIP UI*. Jakarta (1 November 2006).

Wirajuda, N. Hassan. "Diplomasi Total di Era Informasi". Pidato pada *Seminar Public Relations "Pergeseran Paradigma PR: PR Konvensional vs PR Modern"*. Intermatrix Communications, Hotel Mandarin Oriental, Jakarta (20 Februari 2003).

Internet

Simamora, Martin. "Portal Deplu Upaya Indonesia Membangun Cyber Diplomacy".
[http://jakarta.wartaegov.com/index.php?option=com_content&view=](http://jakarta.wartaegov.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4620:portal-deplu-)
[article&id=4620:portal-deplu-](http://jakarta.wartaegov.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4620:portal-deplu-)

[upaya-indonesia-membangun-cyber-diplomacy&catid=44:ragamberita&itemid=56](http://jakarta.wartaegov.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4620:portal-deplu-upaya-indonesia-membangun-cyber-diplomacy&catid=44:ragamberita&itemid=56) (diakses pada tanggal 15 Desember 2009 pukul 23.56 WIB).

"Cyber Diplomacy Becomes More Aggressive". *People's Daily Online*.
<http://english.people.com.cn/90001/6698096.html> (diakses pada tanggal 16 Desember 2009 pukul 04.30 WIB).

"IRM's Office of eDiplomacy". *U.S. Department of State*.
<http://www.state.gov/m/irm/ediplomacy/> (diakses pada tanggal 16 Desember 2009 pukul 08.52 WIB).